



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati, yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam pelaksanaan tugasnya.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Evaluasi, pengendalian dan pelaporan kebijakan teknis bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
3. Bimbingan teknis bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
4. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
5. Pembinaan jabatan fungsional; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

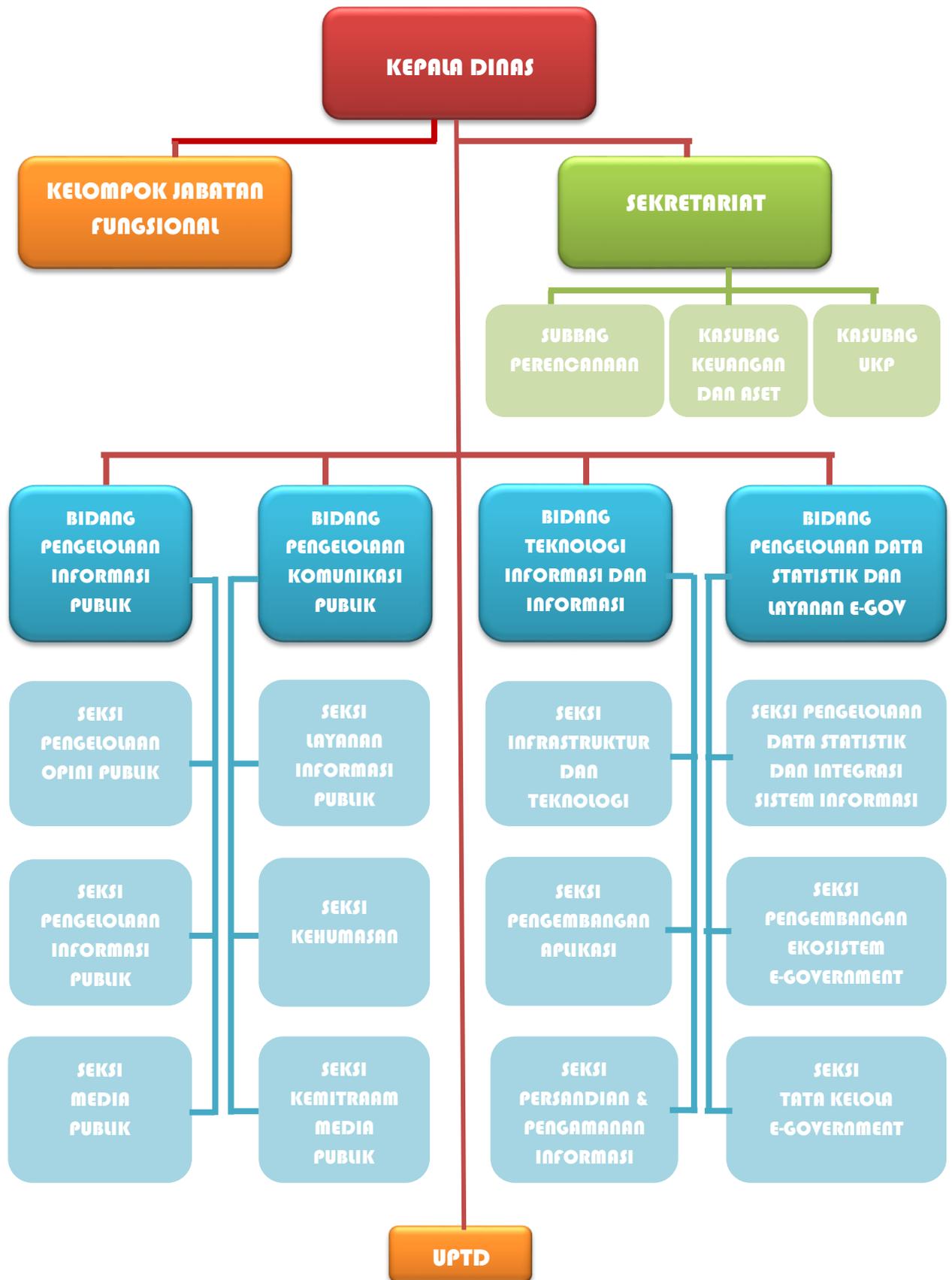


B. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Pengendalian Program
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang
 - 1) Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik terdiri dari
 - a) Seksi Pengelolaan Opini Publik;
 - b) Seksi Pengelolaan Informasi Publik; dan
 - c) Seksi Media Publik.
 - 2) Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik terdiri dari
 - a) Seksi Layanan Informasi Publik
 - b) Seksi Kehumasan
 - c) Seksi Kemitraan Komunikasi Publik
 - 3) Bidang Teknologi Informasi dan Persandian terdiri dari
 - a) Seksi Infrastruktur dan Teknologi
 - b) Seksi Pengembangan Aplikasi
 - c) Seksi Persandian dan Keamanan Informasi
 - 4) Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Layanan *E-Government* terdiri dari
 - a) Seksi Pengelolaan Data Statistik dan Integrasi Sistem Informasi
 - b) Seksi Pengembangan Ekosistem *E-Government*
 - c) Seksi Tata Kelola *E-Government*
4. Jabatan Fungsional
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:





Berdasarkan keadaan pada 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 jumlah pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat, adalah seperti tertera sebagai berikut :

| No. | Jenis Jabatan | Jumlah Pegawai |
|-----|-------------------------|----------------|
| 1. | Struktural : | |
| | Eselon II b | 1 |
| | Eselon III a | 1 |
| | Eselon III b | 4 |
| | Eselon IV a | 14 |
| | Jabatan Fungsional Umum | 15 |
| | Tenaga Kontrak | 8 |
| | Jumlah | 42 |

Perkembangan bidang komunikasi dan informatika telah membawa dampak perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Dengan adanya era keterbukaan informasi masih terjadi kesenjangan informasi pada sebagian kelompok masyarakat hal ini disebabkan karena kondisi geografis wilayah serta ketersediaan infrastruktur. Sudah menjadi tugas pemerintah bersama masyarakat untuk mengurangi kesenjangan tersebut yakni dengan melakukan diseminasi informasi guna memfasilitasi kemudahan dalam memperoleh informasi. Pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi, dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial merupakan upaya yang perlu mendapatkan perhatian.

Seiring dengan hal diatas, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan sarana penunjang yang sangat vital terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Implementasi *E-Government* yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dimaksudkan sebagai peningkatan kualitas layanan publik secara efisien, efektif, dan interaktif adalah konsep yang sinergis antara penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis TIK.



Namun untuk menerapkan hal itu sangat terkait dengan kesiapan infrastrukturnya, sumber daya aparaturnya, dan masyarakatnya sebagai pengguna (user). Disamping itu, tuntutan perubahan sikap dan perilaku pada kalangan aparatur pemerintah dan masyarakat dengan diterapkannya *E-Government* merupakan aspek yang mempunyai resistensi cukup besar dan perlu waktu serta proses untuk mengubahnya secara bertahap.

Berbagai media informasi juga perlu lebih diberdayakan dan didayagunakan dalam rangka penyebaran dan pemerataan informasi kepada masyarakat agar terjalin komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyampaian informasi berbagai kebijakan pemerintah sehingga dapat dipahami oleh masyarakat, disamping tetap mendorong dengan memberdayakan potensi-potensi lembaga komunikasi sosial seperti Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), serta menjadi *agen manajemen informasi* sekaligus sebagai *public relation* seiring dengan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai implikasi berlakunya undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik hak masyarakat untuk memperoleh informasi menjadi lebih mudah dan cepat, serta akurat.

Statistik sektoral yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, statistik dan persandian adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas- tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Mengingat pentingnya peranan data yang terkait dengan statistik sektoral, yang nantinya akan menjadi basis informasi, dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan, untuk itu ketersediaan data statistik sektoral sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi, maupun evaluasi atas pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah di Kabupaten kotawaringin Barat.



Pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandian sebagaimana termuat dalam Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, **Persandian** merupakan Urusan Pemerintahan Konkuren yakni Urusan Wajib Pemerintah Daerah, dalam kelompok Non Pelayanan Dasar, terkait dengan kewenangan **pertama** yaitu Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator keberhasilannya dilihat dari jumlah informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan, serta dari jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian. Layanan berikutnya terkait dengan melaksanakan dukungan kegiatan pengamanan informasi, dengan indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan.

Sedangkan kewenangan **kedua** terkait dengan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan bentuk layanannya yaitu melaksanakan pola hubungan komunikasi sandi, berdasarkan indikator berupa jumlah organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan.

Kondisi ini tentunya perlu sejalan dengan kemampuan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat di antaranya melaksanakan penatalaksanaan persuratan berita rahasia, melaksanakan pengamanan berita atau informasi yang bersifat rahasia dan berklasifikasi, mengadakan dan memelihara peralatan dan sistem sandi, melakukan komunikasi koordinasi persandian, dan mengamankan sinyal frekuensi dan jaringan di lingkungan pemda.



C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penulisan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya

BAB II VISI DAN MISI

Dalam bab ini berisikan ikhtisar Visi dan Misi, Rencana Strategis yang paling global untuk kemudian dijabarkan lagi secara rinci

BAB III PROGRAM, SASARAN DAN PROGRAM TERPILIH

Dalam bab ini berikan penjabaran lebih lanjut atas Visi dan Misi berupa Tujuan, Sasaran dan Program Tahunan SKPD

A. TUJUAN

B. SASARAN

C. PROGRAM

BAB IV KEBUTUHAN DATA KINERJA

BAB V RENCANA KINERJA

BAB VI PENUTUP



BAB II

VISI DAN MISI

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung program kerja Bupati Kotawaringin Barat yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan visi *“Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata dan Ikhlas”* dan sebagai perwujudan dari bagian rencana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat Visi tersebut dijabarkan dengan **Misi** sebagai berikut :

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olah raga;
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat;
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis;
6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata;



Sejalan dengan visi dan misinya, telah diidentifikasi beberapa tujuan daerah yang akan melandasi program program unggulan kepala daerah yang telah menjadi komitmen politis serta diintegrasikan dalam perencanaan teknokratisnya meliputi:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi
2. Peningkatan kemandirian pembiayaan pembangunan
3. Peningkatan Kualitas SDM
4. Pengembangan komoditi unggulan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan menopang perekonomian daerah
5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah
6. Pengembangan industri koperasi dan UMKM serta daya saing daerah
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana berdasarkan asas konservasi, efisien dan lestari
8. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur wilayah
9. Peningkatan kesesuaian tata ruang wilayah yang berkualitas
10. Peningkatan pemahaman kesadaran dan pengalaman beragama
11. Peningkatan pemberdayaan masyarakat
12. Peningkatan ketertiban dan ketenteraman masyarakat
13. Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya
14. Peningkatan pariwisata daerah

Dengan memperhatikan rangkaian visi hingga program prioritas kepala daerah di atas, serta dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dapat ditarik relevansi hubungannya sebagai berikut :

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai salah satu lembaga teknis yang bertugas dan bertanggungjawab atas penyebarluasan informasi komunikasi, Teknologi Informasi, Statistik dan keamanan persandian mempunyai peranan penting dalam perwujudan visi Bupati tersebut, khususnya berkaitan dengan misi



pertama yaitu : *“Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan”*.

Dalam rangka pencapaian misi pertama di atas maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut: *“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (GOOD GOVERNANCE)”*, dengan sasaran pembangunan yang meliputi:

1. Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan
2. Meningkatnya system akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa

Dimana sasaran yang ketiga adalah yang secara langsung berkaitan dengan tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat. Linieritas antara Misi 1 RPJMD hingga Sasaran RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat yang diacu oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat dapat digambarkan sebagai berikut :



A. TUJUAN

Dari sasaran Nomor 3 yaitu "*Meningkatkan Kualitas layanan Publik Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi*" ditetapkan tujuan, sasaran program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat terkait dengan Misi Nomor 1 yaitu "*Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan*" adapun Tujuan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat adalah:

1. Meningkatkan tata kelola kelola pemerintahan pemerintahan yang baik, dan layanan publik berbasis teknologi informasi
2. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel



B. SASARAN

Sasaran Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian adalah :

1. Meningkatkan layanan publik berbasis teknologi informasi
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis *E-Government*, data statistik dan pengamanan data



C. PROGRAM

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | | | | |
|----|--|------------------|---------|--|---------|--|----------|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | Indeks SPBE | 1 | Meningkatnya layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | 1 | Indeks Domain Layanan SPBE (Bobot 55%) | 1 | Layanan Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Daerah | Cakupan Layanan Penyediaan Informasi Publik Pemerintah daerah | 1 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Jumlah Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Yang dilaksanakan |
| | | | | | | | | | | 2 | Pengelolaan Informasi Publik daerah | Jumlah Informasi Publik Pemerintah daerah Yang Dikelola |
| | | | | | | | | | | 3 | Pengelolaan Konten Media Publik | Jumlah Konten Media Publik Yang Dikelola |
| | | | | | | | 2 | Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah daerah | Cakupan Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah daerah | 1 | Pengembangan Kemitraan Komunikasi Publik | Jumlah Kemitraan Komunikasi Publik Yang Dikembangkan |
| | | | | | | | | | | 2 | Pengembangan Layanan Hubungan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah | Jumlah Hubungan Komunikasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Dikembangkan |
| | | | | | | | | | | 3 | Layanan Penyediaan Informasi Pemerintah daerah | Jumlah Layanan Informasi Pemerintah daerah Yang Disediakan |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | 2 | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis E-Government, Data Statistik dan Pengamanan Data | 2 | Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE (Bobot 17%) | 1 | Pengembangan Infrastruktur, Komunikasi dan Informatika | Cakupan Pengembangan Infrastruktur, Komunikasi dan Informatika | 1 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK) | Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK) Yang Disediakan, Dikembangkan dan Dipelihara | | |
| | | | | | | | | | | 2 | Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi | Jumlah Aplikasi Yang Disediakan dan Dikembangkan | | |
| | | | | | | | 2 | Pengamanan Informasi Daerah | Tingkat Pengamanan Informasi Daerah | 1 | Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berkualifikasi | Jumlah Informasi Yang Dikelola dan Diamankan | | |
| | | | | | | | 3 | Indeks Domain Tata Kelola SPBE (28%) | 1 | Implementasi dan Pengembangan E-Government | Cakupan Implementasi dan Pengembangan E-Government | 1 | Pengembangan Sumber Daya TIK Daerah | Jumlah Sumber Daya TIK Yang Dikembangkan |
| | | | | | | | | | | | | 2 | Penerapan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi | Jumlah Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Yang Diterapkan |
| | | | | | | | | | | | | 3 | Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi | Jumlah Sistem Informasi Terintegrasi Yang Dikembangkan |
| | | | | | 2 | Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah | Tingkat Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah | 1 | Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah | Jumlah Dokumen Data dan Statistik daerah | | | | |

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2018





BAB IV

KEBUTUHAN DATA KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dengan melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran, dan menetapkan target.

Dalam penyusunan RKT Dinas Komunikasi, Informatika, Statistatik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat juga harus memperhatikan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistatik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

Rencana pembangunan lima tahun ini kemudian dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja). Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1(satu) tahun. Renja SKPD yang disusun mengacu pada Renstra dan pagu indikatif yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD. RKA menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran, yang selanjutnya akan menjadi dasar ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran yang disingkat dengan DPA.



BAB V RENCANA KINERJA

Capaian Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat didasarkan pada sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Sasaran RPJMD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat bertujuan untuk Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis *E-Government* dengan indikator sasaran Indeks *E-Gov* (Sistem Pemerintahan berbasis elektronik/SPBE)

Target capaian Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 dapat dilihat pada table berikut:

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|------------------|---|---|-------------|
| | | | | | 2018 |
| 1 | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel | Indek SPBE | | SPBE | 1,89 |
| | | | Meningkatnya Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | 1 Indeks Domain Layanan SPBE (Bobot 55%) | 1,3 |
| | | | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis E-Government, Data Statistik dan Pengamanan Data | 2 Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE (Bobot 17%) 3 Indeks Domain Tata Kelola SPBE (Bobot 28%) | 0,19 0,4 |



BAB VI PENUTUP

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin barat melalui berbagai program dan kegiatan.

Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dengan melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran, dan menetapkan target.

Sebagai upaya mewujudkan tercapainya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dituangkan dalam program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat maka diperlukan adanya komitmen baik dilingkup Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat maupun pihak yang terkait.

Pangkalan Bun Desember 2018

Kepala Dinas

RODY ISKANDAR, S. Sos, M.Si.
NIP. 19690831 199012 1 0



RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|---------------------------------------|-------------|
| | | INDEKS SPBE | 1,89 |
| 1 | Meningkatnya Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | Indeks Domain Layanan SPBE | 1,3 |
| 2 | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis E- Government, Data Statistik dan Pengamanan Data | Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE | 0,19 |
| | | Indeks Domain Tata Kelola SPBE | 0,4 |

Pangkalan Bun, 5 Desember 2018

Kepala Dinas

RODY ISKANDAR, S.Sos, M.Si.
Nip. 19690831 199012 1 003